

KONSEP MULTIKULTURALISME WILL KYMLICKA BAGI KEHIDUPAN BANGSA INDOESIA

Fidelis Solilit
Pasca Sarjana Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon
Fidelissolilit28@gmail.com

Abstrak

Konsep Multikulturalisme Will Kymlicka dan ditinjau dari sudut pandang filsafat politik. Persoalan yang diangkat adalah bagaimana Kymlicka mengupayakan agar ada kesetaraan dalam diri setiap orang baik itu mayoritas maupun minoritas, di mana setiap orang harus mendapat perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kesetaraan yang dimaksudkan adalah sikap penerimaan baik dalam minoritas dan mayoritas. Minoritas dalam konteks Kanada adalah masyarakat asli di dalam daerah tersebut. Sedangkan mayoritas dalam konteks ini adalah para imigran yang datang kemudian tinggal di daerah tersebut, di mana karena mereka memiliki kekuasaan sehingga menindas minoritas bangsa. Dengan demikian, konsep multikulturalisme pertama-tama membantu kita untuk mengerti betapa berharganya perbedaan dan membantu menyadarkan kita untuk terbuka serta toleran bagi perbedaan itu.

Kata Kunci: Multikulturalisme, Minoritas, Mayoritas, Toleransi.

Abstract

Will Kymlicka's concept of Multiculturalism and viewed from the point of view of political philosophy. The issue raised is how Kymlicka strives for equality in everyone, be it a majority or a minority, where everyone must receive the same treatment without discriminating from one group to another. Equality is meant is an attitude of acceptance in both the minority and the majority. Minorities in the Canadian context are the indigenous peoples within the area. While the majority in this context are immigrants who came later to live in the area, where because they have the power to oppress the nation's minorities. Therefore, the concept of multiculturalism first of all helps us to understand the value of differences and helps make us aware of being open and tolerant of those differences.

Kata Kunci: Multiculturalism, Minority, Majority, Tolerance.

PENDAHULUAN

Masyarakat modern sering dihadapkan pada kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas dan diterimanya perbedaan budaya mereka. Hal itu sering disebut sebagai tantangan dari "Multikulturalisme". Namun, istilah "multikultural" mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda, di mana masing-masing memiliki tantangan sendiri-sendiri. Tantangan yang dimaksudkan adalah

bagaimana mengupayakan keterbukaan akan keberagaman, baik dalam minoritas maupun mayoritas. Keterbukaan ini diupayakan agar setiap orang memiliki hak yang sama tanpa memandang kelompok minoritas maupun mayoritas.

Setiap manusia menginginkan hidup yang bebas, mengungkapkan pendapat, dan sebagainya, karena setiap manusia memiliki hak dan kebebasan yang mutlak. Namun, Kymlicka melihat hak dan kebebasan itu

hanya diperoleh oleh masyarakat mayoritas, sedangkan masyarakat minoritas tidak memiliki hak dan kebebasan itu. Misalnya, keadaan orang-orang Amerika-Afrika yang tidak masuk dalam pola imigran suka rela, bukan saja karena mereka dibawa ke Amerika secara paksa sebagai budak, tetapi juga karena mereka dicegah dan bukannya didorong untuk berinteraksi ke dalam institusi-institusi kebudayaan mayoritas.¹ Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa penerapan hak-hak minoritas tertentu, membantu untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dari mereka yang dianggap lemah (minoritas), menderita dalam perbedaan, lembaga-lembaga dan dalam melakukannya mengutamakan kejujuran. Inilah tindakan yang tidak adil karena sesungguhnya setiap orang baik itu minoritas maupun mayoritas mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang adil.²

Situasi/Gambaran Minoritas Dan Mayoritas Di Indonesia

Minoritas

Dalam pengertian politik, minoritas adalah kelompok sosial yang memiliki populasi penduduk sedikit bila dibandingkan dengan mayoritas. Minoritas dapat pula menunjuk ke kelompok bawaan maupun marginal. Adapun pengertian lain di mana istilah 'minoritas' dapat dipahami sebagai jumlah populasi yang lebih sedikit dari sebuah jumlah populasi yang lebih besar secara keseluruhan. Selain bersifat numerik, minoritas juga dapat diartikan sebagai tidak dominan, dan mendapat perlakuan yang merugikan atau berada dalam situasi yang

¹Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta: Pusat LP3ES Indonesia, 2002), hlm. 35.

² Bdk. Will Kymlicka and Wayne Norman, "*Citizenship In Diverse Societies*" (New York: Oxford University Press 2000), hlm.163.

tidak diuntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Minoritas menunjuk bagi mereka yang kecil, tak punya kekuasaan, atau tak ternilai di mata kelompok Mayoritas.

Mayoritas

Mayoritas adalah lawan dari minoritas. Mayoritas adalah jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain, di mana tidak memperlihatkan ciri itu. Misalnya, dalam dunia politik jumlah suara terbanyak pemilih, di mana meyakinkan yang dapat dikumpulkan dalam pemungutan suara untuk menentukan kemenangan ataupun jumlah suara pemilih mencapai 60%—90%, yang dapat dikumpulkan oleh sebuah partai dalam pemungutan suara. Dengan pengertian ini, dapat kita ketahui bahwa hanya orang mayoritaslah yang memperoleh kemenangan, karena pertama-tama dilihat dari jumlah suara terbanyak dalam pemilihan. Dari konteks inilah, pertama-tama hendak menjelaskan bahwa persoalan minoritas dan mayoritas masih berlangsung hingga sekarang ini.

Pengakuan atas Kebebasan Setiap Individu

Pengakuan adanya kelompok minoritas menunjukkan pengakuan atas suatu individu atau kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan khusus, baik dilihat dari segi budaya, agama, suku maupun dari segi cara membangun interaksi dan keintiman sosial. Perbedaan ini tidak boleh menghalangi seseorang maupun kelompok tertentu untuk mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan publik. Negara harus memiliki kapasitas untuk mengakomodasi mereka. Walaupun harus ditempuh melalui cara yang berbeda/tidak seragam, untuk memastikan akses dan layanan publik tersebut dapat dinikmati oleh kelompok minoritas ini.

Negara Indonesia adalah Negara yang besar. Di mana sejak berdirinya Negara

Kesatuan Republik, para pendiri telah menyadari bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Majemuk karena terdiri atas berbagai suku, adat istiadat, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Dengan keanekaragaman tersebut, mengharuskan setiap langkah dan kebijakan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diarahkan, demi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam perkembangan saat ini, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang saling menghormati dan saling menerima perbedaan yang mereka miliki. Karena Indonesia berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, di mana mereka disatukan oleh semboyan yang terkenal *Bineka Tunggal Ika* artinya bangsa Indonesia walaupun mempunyai latar belakang suku, agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda, tetapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sungguh-sungguh memiliki keseragaman dan memiliki Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan perbedaan itu. Maka, yang sering kali terjadi adalah agama digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan orang lain. Indonesia adalah bangsa yang jujur dalam dunia politik, bahkan sampai saat ini pemerintah selalu berusaha untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

Saling menghargai adalah salah satu dampak untuk mewujudkan perbedaan itu menjadi satu. Karena pada dasarnya semua orang harus dihargai, bukan karena minoritas atau mayoritas, bukan karena kita memiliki kekuasaan yang sama, bukan karena kita kaya atau miskin dan sebagainya. Artinya kita semua mempunyai hak hidup yang sama. Karena kita adalah satu ciptaan, dan kita adalah saudara. Bagaimana pemikiran dari Will Kymlicka mengenai kewargaan minoritas dan mayoritas? Apa yang melatarbelakanginya sehingga Kymlicka menggagas pemikirannya tentang Multikulturalisme.

Pemikiran Will Kymlicka

Will Kymlicka lahir pada tahun 1962. Ia adalah seorang filsuf politik Kanada yang terkenal dengan karyanya tentang multikulturalisme dan etika hewan. Ia juga adalah Ketua Riset Kanada dalam Filsafat Politik di Queen's University di Kingston, dan seorang professor filsafat pada Queen University Kanada, meraih B.A. dalam filsafat dan politik dari Queen's University tahun 1987.³ Kymlicka adalah seorang yang serius mendalami multikulturalisme. Kymlicka berpendapat bahwa pada zaman modern selayaknya sekarang ini, suatu negara tidak dapat lagi membanggakan kehomogenitasan budayanya, tidak ada lagi suatu negara modern yang terdiri atas hanya satu bangsa atau satu etnis yang menghuninya. Negara sekarang menjadi semakin multikultural. Selain itu, Kymlicka juga disebut pemikir awal yang memberikan deskripsi yang sistematis dan runut tentang hak minoritas.

Latar Belakang Pemikiran Will Kymlicka tentang Multikulturalisme

Multikulturalisme terdiri dari dua kata, Multi dan Kulturalisme. Multi berarti banyak, sedangkan kulturalisme berarti menyangkut paham. Dengan pengertian itu, maka multikulturalisme merupakan suatu paham atau ideologi mengenai keanekaragaman kehidupan di dunia. Multikulturalisme menekankan mengenai sikap penerimaan dari satu kelompok ke kelompok lain terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya di tengah-tengah realitas masyarakat. Dengan konsep ini, Will Kymlicka mendefinisikan multikulturalisme

³ Wikipedia Bahasa Indonesia, "Will Kymlicka". Diambil dari: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Will_Kymlicka (diunduh pada hari rabu. 10 Maret 2021. Pkl. 23.00. WITA).

sebagai suatu paham di mana ia berusaha agar setiap orang harus diperlakukan layak dengan melihat pada hak-haknya, karena setiap orang memiliki kebebasan baik secara individu maupun kelompok yang tercermin dalam kebudayaan. Untuk itu, hal yang paling dasar ditenkankan oleh Kymlicka mengenai toleransi atau kesetaraan dalam konteks hak perorangan dan individu.

Beberapa tulisannya membahas fenomena multikulturalisme di negara tempat ia berdomisili, yaitu Kanada. Salah satu pemikirannya yang terkenal argumennya mempertahankan multikulturalisme liberal. Dalam tulisannya, Kymlicka mendefinisikan multikulturalisme liberal sebagai bentuk demokratik-liberal dari multikulturalisme yang berakar dari nilai-nilai liberal kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi. Bentuk multikulturalisme ini memberikan perlindungan dari diskriminasi, mengakui dan mengakomodasi kebebasan individu kelompok minoritas seperti kebebasan berbicara, membentuk kelompok, menjalankan agama, dan lain-lain). Tidak hanya memberikan perlakuan yang setara dengan kelompok mayoritas, kebijakan multikulturalisme liberal juga mencoba untuk mengakomodasi berbagai bentuk keragaman termasuk pengakuan hak akan tanah, otonomi daerah dan pengakuan bahasa, dan hak akomodasi untuk kelompok imigran.⁴ Salah satu penegasan Kymlicka adalah mengenai;

Identitas menjadi suatu tema yang terus hangat untuk dibahas. Mengingat hakikat manusia selalu berubah, identitas manusia dan dunianya tentu bersifat dinamis (lentur dan fleksibel). Premis-premis modernitas yang

⁴ Bdk. NN. "Pemikiran Multikulturalisme Will Kymlicka". Diambil dari: https://www.academia.edu/7489993/Pemikiran_Multikulturalisme_Will_Kymlicka (unduh pada hari Senin, 28 Juni 2021. Pkl. 17.00. WITA).

bergelayut tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Identitas bukan lagi pertarungan dikotomis antara A dan B tetapi lebih pada perebutan berbagai identitas tertentu. Alhasil, setiap insan memiliki identitas ganda bahkan multi-identitas. Fenomena globalisasi dengan segala daya dukungnya membuat kerumitan dunia sosial semakin nyata. Jika benar demikian, maka konsep multi-identitas dalam arus globalisasi perlu sejenak kita beri ruang khusus.⁵

Kymlicka memperjuangkan hak-hak kultural yang mengakomodasi kelompok masyarakat minoritas dalam sebuah bangsa. Ia mengambil contoh kelompok bangsa Quebec di Kanada dan Maori di Selandia Baru. Dua kelompok minoritas ini patut menerima perlakuan khusus dari pemerintah karena mereka memiliki peran dalam sejarah pembentukan masing-masing negara. Mereka telah memiliki sejarah kepemilikan atas negara yang baru jauh sebelumnya. Sedangkan untuk kelompok imigran, mereka datang ke suatu negara secara sukarela, sehingga mereka memiliki tanggungjawab untuk mengintegrasikan diri mereka ke dalam negara. Namun demikian, tetap harus diberi kesempatan untuk hidup dengan layak dan mendapat perlakuan baik dari negara.

Hak Perorangan dan Hak Kolektif

Komitmen yang paling mendasar dari suatu demokrasi liberal adalah kebebasan dan kesetaraan terhadap warga yang secara personal tercermin pada pernyataan konstitusional hak-hak manusia, dengan menjamin hak-hak dasar sipil dan politik kepada semua orang tanpa memandang siapa pun. Pada bagian ini, penulis akan membahas

⁵ Terkutip dalam: NN. "Politik Multikulturalisme" Diambil dari: <https://heuristik.id/politik-multikulturalisme-will-kymlicka/> (diunduh pada hari Senin, 28 Juni 2021. Pkl. 18.45. WITA).

apa dan bagaimana hak perorangan dan hak kolektif yang digagas oleh Will Kymlicka.

Hak Perorangan

Hak perorangan adalah hak yang dimiliki oleh masing-masing individu sejak dilahirkan. Menurut Pierre Trudeau (seorang mantan perdana menteri di Kanada) bahwa ia percaya pada orang perorangan dan hanya orang perorangan yang menjadi pemilik hak. Berkaitan dengan pernyataan itu, maka Kymlicka mengemukakan dua macam tuntutan, yaitu pembatasan internal dan perlindungan eksternal. Pembatasan internal yang dimaksudkan ialah hubungan kelompok etnis atau bangsa yang mencari penggunaan kekuasaan negara dalam membatasi kebebasan kelompoknya, demi meningkatkan solidaritas dalam negara. Perlindungan eksternal adalah tidak menciptakan ketidakadilan seperti dengan memberikan hal perwakilan khusus, tuntutan atas tanah, atau hak berbahasa bagi suatu minoritas yang tidak membuat agar mereka mendominasi kelompok lain.⁶ Menurut Kymlicka, dua tuntutan itu tidak perlu di tunjukan secara bersamaan, sebab ada beberapa kelompok etnis atau bangsa berusaha untuk mengupayakan adanya perlindungan eksternal bagi masyarakat yang luas. Upaya itu tanpa ada paksaan yang legal dari pembatasan internal dengan mengarah pada konsep fundamental, dan sangat berbeda dengan hak minoritas sehingga perlu menentukan tuntutan yang dapat diajukan. Hal itu terjadi karena tercipta hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas etnis atau bangsa yang memiliki perlindungan eksternal akan sepenuhnya menghormati hak sipil dan politik dari anggotanya.

Berdasarkan hak perorangan itu, maka ada tiga bentuk hak kewargaan kelompok,

⁶ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, hlm 53.

yaitu hak perwakilan kelompok, hak atas pemerintah dan hak atas polietnis. *Pertama*, hak perwakilan kelompok hadir sebagai lembaga politik masyarakat minoritas bangsa atau etnis yang diabaikan dalam sebuah keputusan demi melindungi masyarakat mayoritas. Dalam politik kaum minoritas sama sekali tidak mempunyai hak untuk memutuskan, tetapi sebaliknya keputusan itu berasal dari kaum mayoritas. *Kedua*, dalam hak kekuasaan itu dialihkan ke kaum politik yang kecil, sehingga minoritas bangsa tidak dapat dikalahkan dalam pemilihan, walaupun ada tawar-menawar dari mayoritas berkaitan dengan kebudayaan, seperti pendidikan, imigran, pengembangan sumber daya, bahasa dan hukum keluarga. Secara sederhana politik itu dialihkan pada unit yang paling kecil agar bangsa minoritas tidak dapat dikalahkan oleh mayoritas. *Ketiga*, hak polietnis mengupayakan adanya perlindungan yang tidak didukung secara layak, secara khusus dalam praktik keagamaan dan kebudayaan yang khas. Adapun pemaksaan dalam pembatasan internal, di mana kelompok imigran dan minoritas agama mencari kekuasaan hukum untuk memaksakan praktik-praktik kebudayaan tradisional pada anggota mereka.⁷

Melihat beberapa gagasan mengenai hak perorangan dari Kymlicka, kini hak perorangan tersebut mendapat ancaman dari pembatasan internal yang cukup nyata. Namun ada kekeliruan bahwa dengan mengizinkan praktik-praktik yang opesif merupakan pengembangan yang logis dari kebijakan multikulturalisme di negara-negara imigran. Kebijakan yang dimaksud agar memungkinkan para imigran mengekspresikan identitas etnisnya. Itulah yang diinginkan oleh mereka agar mengurangi tekanan eksternal. Inilah model polietnisitas dari kebijakan pemerintahan di Kanada, Australia dan Amerika Serikat yang mendukung kemampuan para imigran untuk

⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

mengatur kebebasan perorangan dan menerima atau menolak identitas itu. Inilah kebijakan pemerintah yang mendukung beberapa perlindungan eksternal dan menolak pembatasan internal. Kymlicka mengatakan perbedaan antara pembatasan internal dan perlindungan eksternal, di mana sering diabaikan oleh para pendukung maupun sekelompok orang yang mengkritik hak-hak kelompok.⁸ Ada penolakan yang secara relevan pada pembatasan internal, tidak berlaku untuk perlindungan eksternal, karena pada dasarnya tidak menempatkan kelompok di atas dan melebihi perorangan. Jadi, dengan adanya pembatasan internal dan perlindungan eksternal, setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk mengungkapkan haknya di depan umum, baik secara person maupun secara kelompok.

Hak Kolektif

Menurut Kymlicka ada ratusan definisi literatur, namun hampir setiap orang menyetujui bahwa hak-hak kolektif bukanlah hak-hak perorangan.⁹ Istilah hak kolektif sama sekali tidak membantu masyarakat untuk membentuk kewargaan, karena istilah itu terlalu luas dan bahkan gagal membedakan pembatasan internal dan perlindungan eksternal. Perbedaan itu menampilkan satu interpretasi terhadap hak kolektif yang telah mengemukakan dikotomi salah bagi hak perorangan. Sebagai catatan bahwa ketika memberikan hak khusus kepada pemerintah provinsi akan ada bahayanya yang memberikan kesan bahwa pemerintah hanya melayani kepentingan mereka yang dominan.¹⁰

Persoalan dasar dari hak kolektif adalah para migran tidak masuk dalam kategori bangsa di negara yang mereka

datangi. Bahkan mereka itu berbeda dengan kelompok minoritas. Minoritas diartikan sebagai kelompok bangsa yang telah terpinggirkan karena adanya bangsa lain yang lebih mendominasi. Mereka bukan pendatang namun merupakan penduduk asli di tanah mereka. Kymlicka mengatakan bahwa adanya percampuran yang terjadi dalam kewargaan kelompok dengan dibedakannya hak-hak kolektif. Dengan percampuran itu, banyak orang telah berasumsi bahwa perdebatan mengenai kewargaan kelompok yang sangat sepadan antara para penganut individualisme dan penganut kolektivisme terhadap hak milik yang relatif dari perorangan dan komunitas.

Para penganut individualisme berpendapat bahwa secara moral perorangan ada sebelum komunitas, karena komunitas hanya sebagai penambah kesejahteraan individu di dalam komunitas. Artinya, bahwa ketika para individual tidak lagi merasa perlu untuk mempertahankan praktik-praktik budaya yang ada, maka komunitas tidak mempunyai kepentingan untuk melestarikannya dan tidak mempunyai hak untuk memaksa atau mencegah para penganut individu menolaknya atau bahkan mengubahnya. Dengan pandangan ini, maka pada penganut individual menolak pemikiran bahwa kelompok etnis dan kelompok bangsa mempunyai hak-hak kolektif. Berbeda dengan para penganut kolektivisme yang menolak bahwa kepentingan komunitas dapat disederhanakan menjadi kepentingan para komunitas. Oleh karena itu, melalui argumentasi ini ia mengharapkan bahwa perlu adanya evaluasi. Karena sesungguhnya dengan adanya evaluasi, maka sebagian besar dari hak kelompok yang dibedakan dalam demokrasi Barat, tidak mengenai keunggulan komunitas dari perorangan.¹¹

Toleransi

⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 67-68.

¹¹ *Ibid.*

Kymlicka mengatakan bahwa secara historis maupun secara konseptual, liberalisme dan toleransi berhubungan sangat erat. Pertanyaannya apa yang melatarbelakangi sehingga munculnya konsep toleransi? Dalam meningkatnya struktur multikultural modern, muncullah berbagai konflik dan isu baru seperti minoritas nasional. Bagi Kymlicka yang melatarbelakangi munculnya toleransi adalah munculnya berbagai konflik yang datang dari suatu bangsa, kelompok, individu untuk memperoleh suatu pengakuan akan martabat manusia yang hidup. Dengan melihat persoalan itu, ia berusaha agar setiap individu dan kelompok akan merasa di hargai tanpa memandang agama, ras, etnis, golongan.¹²

Oleh karena itu, toleransi yang dimaksudkan oleh Kymlicka yakni kesetaraan. Kesetaraan berarti tidak ada perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dengan begitu, setiap individu merasa dihargai dan mempunyai kebebasan dalam menentukan arah kehidupannya. Maka sebagai manusia hal pertama yang harus diketahui adalah soal kesadaran. Setiap individu diajak untuk sadar dan terbuka dalam membangun kesetaraan di tengah-tengah perbedaan.

PENUTUP

Dalam memahami keseluruhan pemikiran Kymlicka yang sudah penulis tampilkan. Hal dasar yang hendak ditekankan adalah kebebasan individual dalam multikulturalisme. Ia berusaha untuk memperjuangkan suatu kebebasan dan kesetaraan terhadap para imigran dan minoritas nasional. Melihat pemikiran itu, saya teringat kata-kata bagus dari Presiden pertama bangsa Indonesia yang akrab disebut Bung Karno. Ia mengatakan “Kalau jadi Hindu jangan jadi orang Indian, kalau jadi

Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi orang Kristen jangan jadi Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat-budaya Nusantara yang kaya raya ini”. Kata-kata Bung Karno ini hendak menyadarkan kita bahwa kita hidup dalam kemajemukan atau yang Kymlicka sebut “Multikulturalisme”, sehingga singkirkanlah tindakan-tindakan yang menghancurkan bangsa. Artinya, Bung Karno berpesan bawa walaupun kita hidup dalam perbedaan tetapi ingatlah bahwa kita ini bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda dalam agama, budaya, ras, etnis, dan sebagainya, tetapi kita tetap satu.

Oleh karena itu, semoga penulisan ini memberikan manfaat bagi para pembaca yang ingin mendalami multikulturalisme Will Kymlicka dan relevansinya bagi kehidupan minoritas mayoritas dalam meningkatkan sikap menghargai hak-hak setiap orang, cinta akan keberagaman, hormat dan toleransi, serta adanya kebebasan. Karena sesungguhnya, kebebasan lebih lazimnya dibedakan antara kebebasan sosial dan kebebasan individual. Kebebasan sosial berarti kebebasan yang dihayati dalam hubungan dengan orang-orang lain, dan secara logis kebebasan jenis ini bercorak negatif karena hanya dirumuskan dengan kata “tidak”. Artinya, kebebasan itu tidak dibatasi oleh orang lain. Sedangkan, kebebasan individual ialah sejauh dipahami dari perspektif seorang subjek individual yang menyangkut kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak. Kebebasan dalam arti kesewenang-wenangan sepatutnya tidak disebut kebebasan, karena para pendukungnya membayangkan adanya kebebasan mutlak tanpa terkait pada batasan apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

Kymlicka Will. *Kewargaan Multikultural*.
Jakarta: Pustaka LP3ES
Indonesia, 2002.

¹² *Ibid.*, hlm. 245.

------. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

------. *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizenship*, 2001.

------. *The Globalization of Ethnicities*. New York: Cambridge University Press, 2007.

------. *Multicultural citizenship : a liberal theory of minority right*. New York: Oxford University Press, 1995

Kymlicka Will and Waryne Norman.
Citizenship In Diverse Societies
“*Kewarganegaraan di Beragam Masyarakat*”. New York: Oxford University Press 2000.

NN. “Pemikiran Multikulturalisme Will Kymlicka”. Diambil dari:
https://www.academia.edu/7489993/Pemikiran_Multikulturalisme_Will_Kymlicka. 28 Juni 2021.

NN. “Politik Multikulturalisme” Diambil dari:
<https://heuristik.id/politik-multikulturalisme-will-kymlicka/>
28 Juni 2021.

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Will Kymlicka”. Diambil dari:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Will_Kymlicka, 10 Maret 2021.